

KONTRAK KEAGENAN UMUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL SELAKU AGENT UMUM (GENERAL AGENT) KAPAL ASING

*The General Agency Contract as The Legal Protection for The
National Marine Transportation Company as The General
Agent of Foreign Ships*

Endang Yuliana¹, Emmy Pangaribuan Simanjuntak², dan Roedjiono²

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The research on general agency contract as the legal protection for the national marine transportation company as the general agent for foreign ships is the one adopting juridical normative approach, the aim of which, is to know whether the given right and responsibility as the result of contract of general agency between the foreign marine transportation company and national marine transportation has legal protection which is fair for the two parties and how the dispute settlement as the impact of the failure to act according to the letter of appointment or the agency agreement.

This research focuses on the library research employing the documentary study equipment for purpose of obtaining the secondary data and the field research is also done to complete the collected secondary data. The sampling technique adopted is a non probability sampling in the form of purposive sampling, using interview as an instrument to collect the primary data. The form of the interview guidance is made variously between structured and unstructured type. The above data were analyzed by using qualitative analysis producing analytical descriptive data.

The result of the research give general and sytematic description that:
(1) The given right and responsibility as the result of general agency appointment to the national marine transportation company by the foreign marine transportation company has been done relatively well, and fulfilling the sense of fairness among the two parties. The evidence is that the two parties implement the content of the contract based on the principle of fairness. This condition has existed since the preparation stage for the contract arrangement, which consists of the pre-contractual stage (good faith in subjective sense) and the contractual stage (good faith in objective sense). The written contract has given legal protection for the general agent. The legal

1. *Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.*

2. *Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

protection is preventive in nature and (2) The existing dispute as the result of the failure to act according to the general agency contract only arises from the written contract as covered in the letter of appointment. The dispute settlement in the form of legal protection having repressive characteristics and which is done by way of non-litigation; peace, negotiation, and conciliation is proven to be effective.

Key words: *General agency contract – legal protection -- general agent of foreign ship*

PENGANTAR

Dibukanya pelabuhan-pelabuhan Indonesia seolah-olah tanpa batas bagi kapal-kapal asing datang ke sini. Perusahaan pelayaran nasional sulit menguasai pangsa muatan luar negeri, karena terhambat sistem kontrak perdagangan yang digunakan pengusaha di dalam negeri. Selama ini eksportir dan importir nasional menggunakan sistem kontrak FOB (*Free on Board*) dalam mengeksport barang. Pengangkutan barang ke negara tujuan ditentukan oleh pembeli. Sebaliknya ketika mengimpor barang kontrak pengiriman barang menggunakan sistem C&F (*Cost and Freight*) dan C.I.F (*Cost, Insurance and Freight*). Kontrak semacam itu menguntungkan *shipping lines* asing karena penguasaan muatan kapal ditentukan oleh pembeli untuk ekspor dan penjual untuk impor. Pelayaran nasional tidak mampu berkompetisi dengan perusahaan pelayaran asing, akibatnya banyak pelayaran nasional saat ini beralih fungsi dari operator pelayaran menjadi agen pelayaran yaitu menjadi agen umum kapal asing (Jurnal INSA, 2002:32). Secara umum keagenan adalah partisipasi pihak lain dalam menjembatani kebutuhan pihak tertentu.

Keagenan umum kapal asing hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP. Nomor. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan jo Pasal 45 ayat (1) KEPMENHUB. Nomor. KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Pasal 1 butir 13 KEPMENHUB, Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, kapal charter, maupun kapal yang dioperasikan). Syarat sebagai agen umum harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis. Menurut Pasal 45 ayat (2)b harus memiliki bukti perjanjian keagenan umum (*agency agreement*), atau surat penunjukan keagenan umum (*letter of appointment*).

Berdasarkan bentuk dan isi suatu *letter of appointment*, hanya memuat

hal umum dan unsur yang sangat terbatas mengenai maksud penunjukan tersebut. Timbul pertanyaan apakah hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak serta apakah hak agen umum sudah terproteksi dengan cukup baik. Berbeda halnya hubungan keagenan yang dibuat berdasarkan suatu *agency agreement*. Konsep hubungan dalam bentuk ini merupakan formulasi yang paling bebas dan terbuka untuk mengakomodasikan berbagai unsur yang dapat memproteksi hak-hak disatu pihak dan mengharuskan pihak lain melaksanakan kewajibannya. Hubungan hukum atas dasar ini memungkinkan *agency agreement* menjadi produk hukum yang mandiri sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari prinsipal. Pemutusan hubungan yang bersifat sepihak yang dilakukan prinsipal dapat dimungkinkan sejauh syarat dan kondisi telah disepakati para pihak, sedangkan *letter of appointment* kemungkinan pemutusan secara sepihak tanpa persetujuan pihak agen dapat terjadi.

Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran dimuka, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak keagenan umum antara perusahaan angkutan laut asing dengan perusahaan angkutan laut nasional telah memberikan perlindungan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan (2) bagaimana penyelesaian perselisihan akibat tidak terlaksananya ketentuan dalam surat penunjukan keagenan umum (*letter of appointment*) atau perjanjian keagenan umum (*agency agreement*)?

CARA PENELITIAN

Penelitian tentang kontrak keagenan umum sebagai perlindungan hukum bagi perusahaan angkutan laut nasional selaku agen umum (*general agent*) kapal asing ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data guna memperoleh data sekunder. Data sekunder itu diperoleh dari penelitian yang didasarkan atas tiga bahan hukum yang terdiri dari; bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Guna mendukung dan melengkapi data sekunder dilakukan juga penelitian lapangan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden dan nara sumber, dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Adapun yang menjadi

sasaran dalam penelitian hukum ini ada dua hal yaitu *norm* (*das sollen*) untuk penelitian kepustakaan dan *prilaku* (*das sein*) untuk penelitian lapangan (Mertokusumo, 1996:30-31).

Bentuk dari laporan hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analitis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soekanto, 1986:250).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Kontrak Keagenan Umum Telah Memberikan Perlindungan Hukum Yang Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak

1. Proses Terbentuknya Kontrak Keagenan Umum Kapal Asing

- a. Tahap pertama pengajuan penawaran
Diawali penawaran yang datangnya dari kedua belah pihak secara timbal balik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tujuan keagenan umum ini. Proses ini pada awalnya dilakukan secara lisan oleh masing-masing pihak, apabila terjadi persesuaian kehendak (penawaran dan permintaan) maka dilanjutkan dengan mengirim surat penawaran dan permintaan via faximile atau email.
- b. Tahap kedua diterimanya penawaran dan permintaan kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menerima surat penawaran dan permintaan yang telah dikirim secara timbal balik dan menerima dan tidak keberatan mengenai isi surat penawaran tersebut, artinya keduanya sepakat atas maksud penunjukan keagenan umum dan juga mengenai ketentuan dan syarat-syarat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan keagenan ini. Berdasarkan ketentuan yang mengaturnya dan sepakat para pihak kontrak dituangkan dalam bentuk tertulis.

2. Bentuk dan Isi Kontrak Keagenan Umum Kapal Asing

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Menurut Tito Latief Ka.subdit

Angkutan Laut Luar Negeri Departemen Perhubungan RI (wawancara), bentuk dan isi kontrak penunjukan keagenan umum dari perusahaan angkutan laut asing kepada perusahaan angkutan laut nasional, disepakati dan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak tetapi dalam bentuk kontrak tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada 2 (dua) macam bentuk kontrak tertulis keagenan umum yaitu:

a. Perjanjian Keagenan Umum (*Agency Agreement*)

Bentuk kontrak tertulis ini biasanya digunakan sebagai bukti bagi perusahaan angkutan laut nasional selaku agen umum dari kapal asing yang status trayeknya tetap dan teratur (*liner*), melakukan kegiatan di pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang menjadi tujuannya dan pada umumnya jangka waktu berlaku perjanjian ini cukup lama minimal 1 tahun.

Isi perjanjian keagenan umum (*agency agreement*) biasanya terdiri dari beberapa pasal yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak. Kepentingan para pihak mengenai hak dan kewajiban diatur secara tegas dan terperinci, untuk jelasnya apa saja yang termuat dalam suatu kontrak tertulis modelnya perjanjian keagenan umum adalah sebagai berikut: (a). Nama kontrak, biasanya singkat dan mencerminkan isi didalamnya, (b). Nama para pihak (perusahaan pelayaran asing dan agen umumnya), (c). Maksud dan Tujuan diadakannya perjanjian ini, (d). Wewenang dan Tanggungjawab para pihak dalam kontrak, (e). Kewajiban dan hak para pihak, (f). Jangka waktu berlakunya kontrak ini, (g). Larangan bagi agen umum, yaitu menerima keagenan dari pesaing bisnis perusahaan yang telah menunjuknya kecuali ada persetujuan secara tertulis dari perusahaan yang menunjuknya, (h). Pemutusan perjanjian, yaitu harus atas kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu. Pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang memutuskan perjanjian kepada pihak lainnya, (i). Berakhimnya perjanjian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melanggar isi perjanjian atau dinyatakan pailit, (j). Pilihan Hukum dan Badan Arbitrase yang dipilih apabila terjadi perselisihan.

b. Surat Penunjukan Keagenan Umum (*Letter Of Appointment*)

Bentuk kontrak tertulis model ini biasanya digunakan untuk mengageni status kapal tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) atau jangka waktu dan frekuensi kunjungan kapal dalam waktu relatif singkat. Bisa juga untuk kapal-kapal yang datangnya secara mendadak (*emergency call*) di suatu pelabuhan Indonesia, untuk penunjukan ini dapat dilakukan

secara langsung oleh nakhoda selaku pihak yang mewakili perusahaannya yang ada di luar negeri.

Isi suatu surat penunjukan keagenan (*letter of appointment*) biasanya hanya memuat hal-hal yang umum saja sebagaimana layaknya suatu surat biasa, tetapi dalam kebiasaan yang berlaku di bidang *shipping* Indonesia mengenai kegiatan keagenan dapat dibenarkan dan sepanjang para pihak serta pihak ketiga mengakuinya sebagai bukti yang sah dari hubungan hukum ini. Hal-hal yang dimuat dalam suatu surat penunjukan keagenan umum adalah sebagai berikut: (a). Nama para pihak (perusahaan yang menunjuk dan ditunjuk sebagai agennya), (b). Hari, tanggal bulan dan tahun surat penunjukan ini, (c). Identitas atau data kapal serta pelabuhan yang menjadi tujuannya kapal, (d). Jenis muatan/ bongkaran, (e). Jasa keagenan yang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang telah ditunjuk selaku agen umum kapal asing tersebut. Apabila melihat isi dari *letter of appointment* tersebut hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara tegas dan rinci, terutama mengenai hak dari agen umum mengenai pendapatan dari jasa yang telah dilakukannya merupakan kewajiban perusahaan yang menunjuknya. Pemberitahuan setiap tindakan yang akan dilakukan agen kepada prinsipalnya merupakan syarat yang esensial dalam kegiatan ini.

3. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Angkutan Laut Nasional Selaku Agen Umum (*General Agent*) Dalam Kontrak Keagenan Kapal Asing

Di mana ada kontak antar manusia atau subyek hukum diperlukan perlindungan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Menurut Mertokusumo (1999:145), dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Perlindungan hukum dilihat dari sifatnya ada dua macam diantaranya adalah bersifat preventif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu hukum mencegah terjadinya perselisihan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan para pihak.

Dalam penyelenggaraan keagenan umum kapal asing, apakah peraturan yang ada telah dapat mengakomodasikan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan (hak-hak) perusahaan angkutan laut nasional selaku agen umum. Kontrak adalah kesepakatan yang mendefi-

nisikan hubungan antara dua pihak atau lebih (Shippey J.D, 2001:1). Isi sebuah kontrak biasanya merupakan pemahaman atau kesepakatan tertulis bersama di antara para pihak terhadap transaksi atau perikatan yang akan dilaksanakan dalam praktek dan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak. Perlindungan hukum di samping dapat diberikan oleh kontrak itu sendiri diberikan juga oleh pemerintah dan asosiasi. Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi pelayaran (INSA dan BIMCO).

a. Oleh Pemerintah

Perlunya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ini tidak lain adalah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasannya, yaitu guna mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam rangka menciptakan landasan untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perusahaan angkutan laut nasional selaku agen umum. Campur tangan pemerintah dalam mengatur masalah keagenan umum kapal asing yaitu untuk mencegah timbulnya praktek-praktek bisnis yang tidak jujur dalam kegiatan keagenan umum kapal asing ini dan menciptakan keterbukaan dalam kegiatan bisnis keagenan ini. Campur tangan pemerintah terutama dimaksudkan untuk melindungi agen umum karena bisa saja timbul suatu keadaan ketidakseimbangan antara kedudukan agen umum dengan prinsipalnya. Hal ini terjadi apabila perusahaan angkutan laut asing mempunyai *bargaining position* lebih kuat dari agen umum disebabkan anggapan dalam praktek bahwa pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan pekerjaan sebenarnya hubungan ini lahir karena perjanjian dan kesepakatan serta saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dapat dilihat dari peraturan yang dikeluarkannya yaitu, PP. Nomor. 82 tahun 1999 jo *KEPMENHUB* Nomor. KM. 33 tahun 2001. Ada Beberapa pasal perlindungan dalam *KEPMENHUB*:

- 1) Pasal 45 ayat (2)b, keharusan memiliki bukti kontrak tertulis *agency agreement* atau *letter of appointment* syarat selaku agen umum;
- 2) Pasal 49 tentang kewajiban membayar uang muka (*advance disbursement*) Bagi perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya datang secara mendadak menunjuk agen umum berdasarkan surat penunjukan umum dari nakhoda kapal;
- 3) Pasal 50 ayat (1) butir 1a, kewajiban agen untuk menyampaikan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) kepada Dirjen Hubla.
- 4) Pasal 50 ayat (1) butir c, mengatur mengenai kewajiban agen dalam

mengurus kepentingan kapal yang diageni selama berada di pelabuhan Indonesia berkenaan jasa kepelabuhan, menunjuk perusahaan bongkar muat, melakukan pembukuan dan *canvassing*, memungut uang tambang atas perintah prinsipal, menerbitkan konosemen, menyelesaikan tagihan dan klaim jika ada, memberikan informasi yang diperlukan prinsipal. Batasan tanggung jawab agen umum sesuai wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

b. Oleh Asosiasi

1) *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*

Hal yang telah dilakukan oleh *INSA* dalam memberikan perlindungan kepentingan kepada anggotanya yang melakukan kegiatan keagenan umum kapal asing ini adalah dengan mengeluarkan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota *INSA*. Kode etik itu mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: (a).Prinsipal dan kapalnya yang akan memasuki dan melakukan aktivitas pelabuhan Indonesia harus diketahui dengan jelas, (b). tidak mengageni kapal asing yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah dan memperhatikan usia kapal yang akan diageni sebaiknya "dibawah 25 tahun", (c). hendaknya kontrak diadakan untuk jangka waktu 1 tahun dan dengan sendirinya dapat diperpanjang dengan sesuai kesepakatan, (d). mengenai kompensasi jasa keagenan yang akan diterima oleh agen didalam kontrak sering disebut "*agent's remuneration*" hendaknya diberlakukan secara seragam diantara sesama anggota *INSA*, agar dapat berkompetisi secara sehat.Khusus mengageni kapal *tramper* hendaknya minta penyetoran uang muka serta meminta "*letter of discharge*" dari prinsipal yang isinya menyatakan bahwa perusahaan atau kapal asing yang akan diageni tidak mempunyai hutang dan tidak sedang diageni perusahaan lain.

2). *The Baltic and International Maritime Council (BIMCO)*

BIMCO adalah sebuah organisasi yang berurusan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan perkapalan dan pelayaran (*Shipping Internasional*). *BIMCO* dapat setiap saat diminta untuk menyediakan informasi mengenai perkapalan dan pelayaran, sebagai contoh kongesti di pelabuhan tertentu, biaya pelabuhan dan pengeluaran-pengeluaran, peraturan pelabuhan dan kebiasaan (*rules of the trade*) dan lain-lain (Rasjad,1996:1-2). Apabila suatu perusahaan angkutan laut asing dalam kegiatan *shipping* telah berulang-ulang dan dengan sengaja melanggar peraturan pelabuhan dan kebiasaan serta melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak agen dalam hal ini *BIMCO* dapat

melakukan tindakan perlindungan bagi agen. Tindakan yang dilakukan BIMCO yaitu, menginformasikan kepada semua *shipowners*, *broker* dan agen yang tergabung didalamnya sebagai anggota, agar pihak tersebut tidak menjalin hubungan kerjasama dengan pihak yang nyata-nyata melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pihak lain. Apabila informasi tersebut telah diketahui banyak pihak, berarti mematikan usaha pihak tersebut. Terakhir melakukan *black list* terhadap pihak yang curang jika diketahui mempunyai itikad tidak baik dalam memenuhi kewajibannya. Tindakan BIMCO dirasakan efektif oleh para anggotanya dalam mengatasi permasalahan mereka.

c. Dari Kontrak Keagenan Umum Yang Dibuat Para Pihak

Esensi sebuah kontrak adalah pemahaman bersama yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan. Proses pembuatan kontrak keagenan ini telah mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang memenuhi unsur keseimbangan, keadilan, asas kepercayaan, itikad baik dan etika bisnis sehingga menghasilkan kontrak telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan contoh kontrak, beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi agen umum;

1) Perjanjian Keagenan Umum (*Agency Agreement*)

- (a) Pasal 2 : Agen Harus Menyediakan Jasa Keagenan. Jasa yang harus dilakukan oleh agen umum yaitu untuk mengurus keperluan perusahaan yang berkaitan dengan urusan kapal, muatan dan urusan umum lain yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Melihat dari bentuk jasa agen sebatas masalah pengurusan, tugas diluar hal yang telah disebutkan diatas dapat dilakukan tetapi harus ada wewenang langsung secara tegas dan tertulis dari perusahaan (prinsipal).
- (b) Pasal 4 dan 12: Mengenai Tanggung Jawab Agen Umum. Menurut kedua pasal ini agen umum hanya bertanggungjawab dan dapat dituntut oleh perusahaan (prinsipal), jika kerusakan dan kerugian yang diderita perusahaan oleh karena agen tidak memenuhi kewajibannya, melakukan kelalaian, kesalahan dan atau kekeliruan baik yang dilakukan pembantu atau sub-agenya diluar tersebut diatas bukan menjadi tanggung jawabnya, agen mempunyai batas tanggung jawab dalam melindungi kepentingan perusahaan sebagai pihak yang diwakilinya. Tetapi tanggung jawab untuk melindungi kepentingan perusahaan dari kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga (pengirim atau penerima barang) baru dapat dilaksanakan oleh agen jika ada wewenang langsung dari perusahaan (prinsipal).

- (c) Mengenai Hak agen Umum: Pasal 6, 8, dan 10. Pasal 6, Agen mempunyai hak untuk menunjuk sub-agen jika di suatu pelabuhan yang termasuk dalam perjanjian ini agen tidak mempunyai kantor di sana, tetapi penunjukan sub-agen harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari perusahaan. Menurut pasal ini jika terjadi kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan agen umum tidak dapat dituntut sepenuhnya menanggung kerugian, perusahaan juga ikut bertanggung jawab. Pasal 8 dan 10, agen umum berhak atas kompensasi jasanya dan berhak atas penggantian semua biaya yang telah dikeluarkannya di mana perusahaan wajib membayar semua biaya tersebut.
- (d) Pasal 14 : Mengenai Pemutusan Perjanjian. Pemutusan itu dapat dilakukan setiap waktu dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada pihak agen sesuai jangka waktu yang telah ditentukan setelah terjadi kesepakatan.
- (e) Pasal 15 : Mengenai Berakhirnya Perjanjian. Disebabkan karena agen melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati, atau bersalah melakukan suatu tindakan kejahatan atau dinyatakan pailit atau dibawah pengurusan kurator. Perusahaan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri. Berakhirnya perjanjian keagenan sama ini dengan sifat perjanjian pemberian kuasa yang diatur Pasal 1813 KUH Perdata tentang berakhirnya perjanjian pemberian kuasa.

2) Surat Penunjukan Keagenan Umum (*Letter of Appointment*)

Berdasarkan bentuk dan isi kontrak model ini di mana kewajiban dan hak para pihak tidak dicantumkan dengan rinci dan tegas di dalamnya. Isinya hanya memuat hal-hal umum yang harus dilaksanakan oleh agen umum dalam menyediakan jasa keagenan demi kepentingan perusahaan (prinsipal) yang menunjuknya, tetapi setiap akan melakukan tindakan berkaitan kepentingan dan kebutuhan kapal yang diageninya selalu memberitahukan dan minta persetujuan secara tertulis dari perusahaan. Semua biaya yang dikeluarkan untuk jasa pengurusan kepentingan perusahaan dan kapal harus diselesaikan oleh prinsipal begitu kegiatan kapal yang diageni selesai atau sebelum keberangkatan kapal, jika perusahaan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku agen umum berhak untuk menahan kapal tersebut. Dalam literatur hak ini disebut hak retensi. Hak retensi adalah hak dari seorang untuk menahan satu barang kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya sebagai pemegang barang sampai satu

utang yang bersangkutan dengan barang itu dipenuhi (Mulano, 1969:234). Hak mana diberikan kepada si wakil berdasarkan Pasal 1812 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut bahwa si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditanganannya sekian lama sehingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntut sebagai akibat pemberian kuasa.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kontrak dari uraian dimuka menggambarkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, hal ini dapat terwujud karena adanya itikad baik dan asas kepercayaan dari kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak tersebut. Meskipun kontrak yang modelnya *letter of appointment* hanya memuat hal yang umum saja, dapat dibenarkan menurut Pasal 1347 KUH Perdata, tetapi kontrak modelnya *agency agreement* menurut penulis lebih memberikan kepastian hukum karena kontrak dapat dipaksakan secara yuridis sesuai asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

B. Penyelesaian Perselisihan Akibat Tidak Terlaksananya Ketentuan Dalam Kontrak Keagenan Umum

1. Wanprestasi Dalam Kontrak Keagenan Umum Kapal Asing

Wanprestasi sering timbul dari kontrak yang modelnya surat penunjukan keagenan umum (*letter of appointment*). Hal ini sering dilakukan oleh pihak perusahaan asing dalam melaksanakan kewajiban menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh agen tidak jarang pula sampai menimbulkan perselisihan. Apabila hal ini terjadi penyelesaiannya melalui jalur nonlitigasi.

2. Bentuk Penyelesaian Perselisihan Keagenan Umum Kapal Asing

Penyelesaian perselisihan adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu bersifat sebagai penanggulangan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk penyelesaian atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Adapun cara yang ditempuh para pihak adalah sebagai berikut:

a. Perdamaian

Cara ini sesuai dengan prinsip bisnis keagenan berdasarkan asas kepercayaan yang menjadi ciri utamanya. Penyelesaian dengan cara damai berdasarkan prinsip kepercayaan tadi, merupakan langkah awal selalu ditempuh oleh para pihak. Komplain yang diajukan dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak dan terpenuhi secara adil menurut tuntutan dan kapasitas masing-masing.

b. Negosiasi

Melalui negosiasi pihak yang berselisih dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajibannya melalui situasi yang sama-sama menguntungkan dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Dalam menyelesaikan masalah disebabkan karena wanprestasi, para pihak melakukan renegosiasi kewajiban dan haknya dan memberi kesempatan pada pihak yang mengalami kesulitan menjalankan kontrak. Menurut mereka hubungan jauh lebih penting dibanding sebuah transaksi.

c. Konsiliasi

Suatu proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Tugas konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak yang berselisih agar ditemukan solusi oleh mereka sendiri. Dalam hal ini pemerintah c.q. Kasubdit Angkutan Luar Negeri (Dirjen Hubla) pernah berperan sebagai fasilitator diantara pihak yang berselisih saat tidak menemukan penyelesaian atas perselisihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak keagenan umum telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Rasa keadilan ini dapat diketahui atau tercermin dari prinsip kepercayaan yang dipegang para pihak serta itikad baik yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan melaksanakan isi perjanjian (itikad baik dalam arti obyektif). Kondisi ini telah terlihat sejak saat mempersiapkan untuk adanya perjanjian meliputi tahap prakontraktual adanya itikad baik dalam arti subyektif, dari kontrak dapat diketahui pada bagian komparasi yaitu penyebutan para pihak serta dasar bertindak para pihak dalam kontrak. Kontrak tertulis telah dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama agen umum. Bentuk perlindungan hukum ini bersifat preventif. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan para pihak. Perlindungan hukum selain diberikan oleh kontrak tersebut dapat juga diberikan oleh pemerintah dan asosiasi.
2. Perselisihan sering timbul dari bentuk kontrak modelnya surat penunjukan umum (*letter of appointment*). Penyelesaian perselisihan merupakan bentuk perlindungan hukum bersifat represif dilakukan melalui jalur non-litigasi. Perselisihan diselesaikan dengan cara

perdamaian, negosiasi dan konsiliasi. Penyelesaian dengan cara ini menurut para pihak merupakan penyelesaian yang cukup efektif dan hasilnya dirasakan cukup adil atas pemenuhan tuntutan yang diajukan masing-masing pihak.

B. Saran

1. Istilah prinsipal, owner's dan atau operator yang masih dipakai hendaknya diganti dengan istilah *shipping company* atau *company* saja. Istilah itu terkesan seolah-olah pelayaran asing merupakan majikan atau atasan dari agen, hubungan mereka bersifat *simbiosis mutualis*, agen bukanlah bawahan dari perusahaan yang menunjuknya, kedudukan dan posisi mereka setingkat.
2. Syarat menjadi agen umum menurut Pasal 45 ayat (2)b KEPMENHUB harus memiliki bukti perjanjian keagenan umum atau surat penunjukan keagenan umum sebaiknya cukup menyebutkan satu bentuk bukti tertulis yaitu perjanjian keagenan umum, karena konsepsi "penunjukan dan perjanjian" adalah dua hal yang berbeda dengan konsekuensi yang berbeda pula.
3. Pemerintah segera membentuk suatu produk khusus undang-undang yang mengatur tentang kegiatan jasa keagenan, karena ketentuan yang ada terlalu sumir untuk mengatur pelaksanaan keagenan umum kapal asing ini. Dengan produk undang-undang khusus akan lebih memberi jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal INSA. 2002. *Konsolidasi Menuju Pengembangan Pelayaran Niaga Nasional*. DPP INSA, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- . 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, Yogyakarta.
- Mulano, Martias Gelar Radjo. 1969. *Pembahasan Hukum*. Perusahaan Daerah Sumatera Barat.
- Rasjad, Durijat. 1996. *Charter dan Dokumen-dokumen Terkait*. Makalah Seminar Shipping Business & Survey Kerjasama Antara PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) dengan PT. Carsurin, Ltd, Padang.
- Shippey J.D. Karla C. 2001. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*. PPM, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.